

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem Penilaian prioritas penduduk tidak mampu yang menggunakan *Datamining* metode *Clustering K-Means* dapat dipergunakan sebagai salah satu alat Sistem Penunjang Keputusan didalam menentukan Kelompok Penduduk Prioritas yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan(PKH).
2. Persentasi hasil akurasi klasifikasi *clustering* dengan menghasilkan 3 kelompok prioritas penerima bantuan Program Keluarga Harapan(PKH). Prioritas pertama menghasilkan 51 data penerima bantuan, Prioritas Kedua menghasilkan 131 data penerima bantuan dan Prioritas ketiga menghasilkan 21 data.
3. Hasil penentuan kelompok prioritas penerima bantuan Keluarga Harapan(PKH) mendapatkan hasil akurasi dari 3 *cluster* dengan menggunakan perhitungan manual Excel dan RapidMiner. Sehingga diperoleh hasil data sebagai berikut, *cluster* pertama perhitungan perhitungan Excel 51 data dengan persentase 25,12% dan RapidMiner 131 data dengan persentase 64,53%. *cluster* kedua perhitungan Excel 131 data dengan persentase 64,53% dan RapidMiner 51

data dengan persentase 25,12%. *cluster* ketiga perhitungan Excel 21 data dengan persentase 9,85% dan RapidMiner 21 data dengan persentase 9,85%.

4. Hasil dari data penduduk menggunakan algoritma *Clustering k-mean* menghasilkan bahwa penduduk yang paling berpengaruh terhadap bantuan Program Keluarga Harapan(PKH) adalah yang terdapat pada prioritas pertama. Atribut yang paling berpengaruh adalah jumlah penghasilan perbulan, karena semakin kecil penghasilan yang diperoleh oleh warga maka akan semakin besar kemungkinan masuk keprioritas pertama dalam menentukan penerima bantuan PKH.

6.2 Saran

Adapun saran-saran yang berguna untuk perkembangan lebih lanjut dari sistem yang diusulkan adalah :

1. Dalam acuan penerapan aplikasi agar bisa efektif, maka diperlukan aturan dan perundangan serta dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk mewujudkan terbentuknya *e-government* yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola dana bantuan Program Keluarga Harapan(PKH).
2. Diperlukan adanya kegiatan pengumpulan data evaluasi secara berkala sebagai bahan input dari sistem penilaian Prioritas Penduduk Tidak Mampu Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan(PKH).